

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Desember 2025, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 1,14% (mtm), lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,23% (mtm). Secara tahunan inflasi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,00% (yoy). Inflasi juga terjadi pada 3 Kabupaten/Kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Batam, Tanjungpinang dan Karimun yang masing-masingnya tercatat inflasi sebesar 1,14% (mtm), 1,28% (mtm), dan 0,92% (mtm) atau secara tahunan sebesar 3,68% (yoy), 2,75% (yoy), dan 2,72% (yoy). Dengan realisasi tersebut, inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 masih terjaga dalam rentang sasaran.

Adapun komoditas utama penyebab Inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2025 terjadi karena didorong oleh Kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 2,91% (mtm) dengan andil sebesar 0,85%. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah sebagai dampak dari ketersediaan yang terbatas akibat bencana hidrometeorologi di daerah sentra penghasil pangan di Sumatera bagian utara ditengah tingginya permintaan masyarakat menjelang natal. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 1,63% (mtm) dengan andil sebesar 0,12%. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga emas seiring dengan berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global. Adapun kelompok transportasi turut mengalami inflasi sebesar 1,13% (mtm) dengan andil sebesar 0,16%. Inflasi kelompok ini disebabkan tingginya mobilitas masyarakat pada periode Natal serta pelaksanaan *Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE) meskipun inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh periode diskon transportasi.

Dengan perkembangan tersebut, pada bulan Desember 2025 perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatat inflasi sebesar 1,14 (mtm), inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,83 pada November 2025 menjadi 111,08 pada Desember 2025. Sedangkan tingkat inflasi sebesar 3,47% (ytd).

Triwulan IV menunjukkan adanya perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau di 3 Kabupaten/Kota, pada Desember 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,47%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,35 pada Desember 2024 menjadi 111,08 pada Desember 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 1,14% dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 3,47%.

Tabel 1. IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm), *Year to Date* (ytd), dan *Year on Year* (yoy) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2025

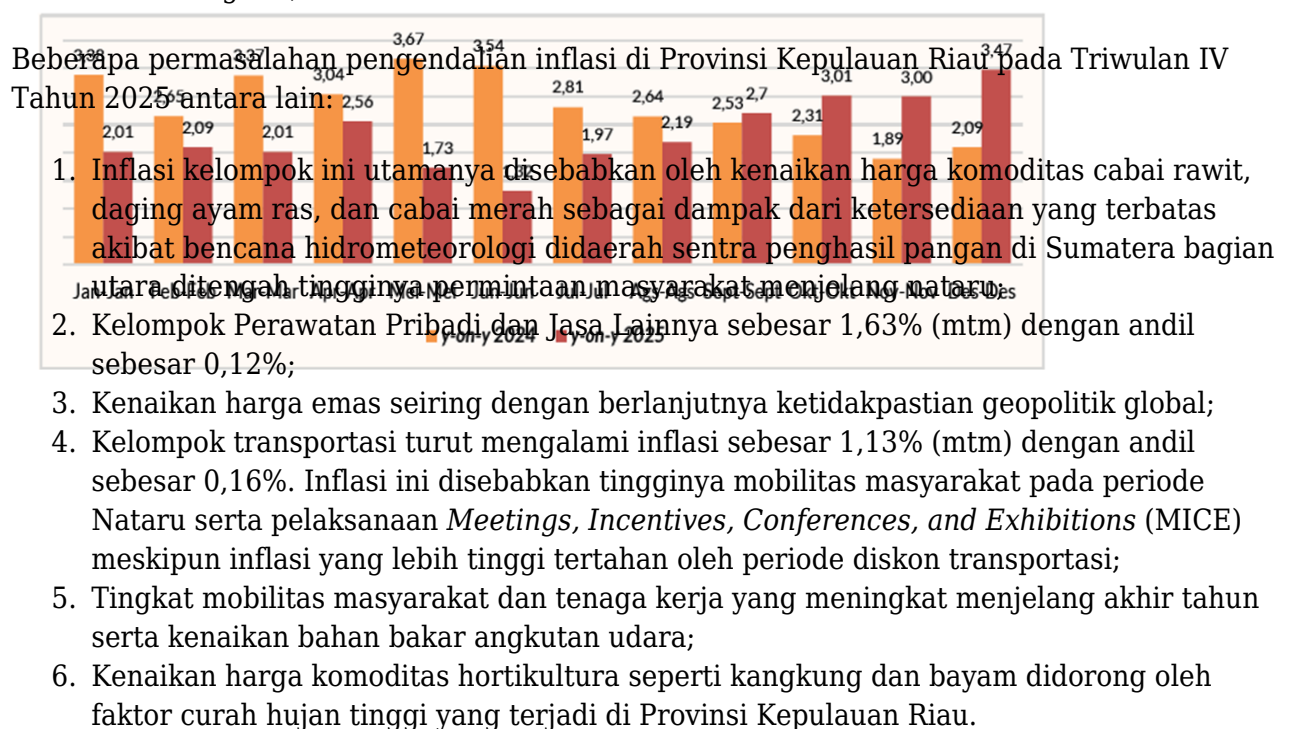
| Kelompok Pengeluaran | IHK Desember 2024 | IHK Desember 2025 | Tingkat Inflasi <i>m-to-m</i> Desember 2025 ¹ (%) | Tingkat Inflasi <i>y-on-y</i> Desember 2025 ² (%) | Andil Inflasi <i>m-to-m</i> Desember 2025 (%) | Andil Inflasi <i>y-on-y</i> Desember 2025 (%) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Umum | 107,35 | 111,08 | 1,14 | 3,47 | 1,14 | 3,47 |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau | 110,31 | 115,90 | 2,91 | 5,07 | 0,85 | 1,49 |
| Pakaian dan Alas Kaki | 106,32 | 107,61 | 0,18 | 1,21 | 0,01 | 0,06 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 105,23 | 106,27 | 0,01 | 0,99 | ~0 | 0,16 |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 101,60 | 101,81 | -0,02 | 0,21 | ~0 | 0,01 |
| Kesehatan | 104,11 | 105,97 | -0,07 | 1,79 | ~0 | 0,04 |
| Transportasi | 112,86 | 115,24 | 1,13 | 2,11 | 0,16 | 0,29 |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | 99,97 | 99,96 | ~0 | -0,01 | ~0 | ~0 |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 102,08 | 102,42 | -0,02 | 0,33 | ~0 | 0,01 |
| Pendidikan | 102,23 | 103,63 | ~0 | 1,37 | ~0 | 0,09 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 103,02 | 105,89 | 0,02 | 2,79 | ~0 | 0,26 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 114,87 | 134,03 | 1,63 | 16,68 | 0,12 | 1,06 |

Tabel 2. Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm), *Year to Date* (ytd), dan *Year on Year* (yoy) Provinsi Kepulauan Riau, Desember 2025 (Persen)

Inflasi Kepulauan Riau pada triwulan IV tahun 2025 menunjukkan upaya pengendalian inflasi yang tetap terjaga akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Provinsi Kepulauan Riau. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi Provinsi Kepulauan Riau, bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2025 tetap terkendali dalam rentang sasaran, pada Oktober 2025 inflasi sebesar 3,01% (yoy), sedangkan inflasi bulan Desember 2025 sebesar 3,47% (yoy). pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional pada sekitar batas atas kisaran target $2,5 \pm 1\%$.



3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV tahun 2025. Beberapa kegiatan di triwulan IV ini terkait pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik dilevel Provinsi maupun Kabupaten/Kota ditengah kuatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif);
 3. *High Level Meeting (HLM)* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan;
 4. *High Level Meeting (HLM)* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang;
 5. Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali;
 6. Edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi;
 7. Pelaksanaan Operasi Pasar/ Pasar Murah;
 8. Pelaksanaan *Capacity Building* klaster pertanian ke Jawa Barat;
 9. Menyelenggarakan Kepri Economic Forum (KEF) 2025 Forum ini menjadi wadah diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepulauan Riau dan sarana diskusi strategis untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa evaluasi terkait kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Provinsi Kepulauan Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Provinsi Kepulauan Riau. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi pada tahun 2026;
 2. Kondisi pasokan pangan yang dipengaruhi oleh hortikultura curah hujan tinggi dan dampak musim angin utara;
 3. Peningkatan permintaan barang dan jasa menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Isra Mikraj dan tahun baru Imlek;
 4. Meningkatnya permintaan komoditas pangan di tengah momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru (Nataru);
 5. Melakukan komunikasi efektif dengan mengelola ekspektasi inflasi masyarakat untuk itu agar dapat menyampaikan melalui media cetak dan media elektronik;
 6. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga terus memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengendalian inflasi melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD);
 7. Pengawasan untuk memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian

inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Tren kenaikan harga emas dunia yang masih berlanjut;
2. Normalisasi tarif angkutan laut pasca berakhirnya periode diskon transportasi;
3. Normalisasi permintaan pangan pasca berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru;
4. Penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-subsidi per 1 Januari 2026;
5. Bibit siklon tropis yang terjadi di Sumatera bagian utara dapat berpotensi terjadinya hambatan dalam rantai pasok komoditas hortikultura;
6. Potensi *imported inflation* didorong oleh kenaikan harga komoditas global;
7. Meningkatnya harga emas sejalan dengan ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung;
8. Akselerasi penyaluran beras SPHP pada semester II 2025;
9. Program diskon angkutan udara menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru;
10. Pemerintah Kepulauan Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Terkendalinya inflasi di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kuatnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah Kepulauan Riau secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).